



PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM PENYEDIAAN PASAR HASIL PROGRAM BURUAN SAÈ KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KELOMPOK MOTEKAR KELURAHAN ISOLA)

Rani Septiani¹⁾

1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Peran Dinas Program *Buruan SAÈ* merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga oleh ketersediaan akses pasar bagi hasil pertanian kelompok sasaran. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyediaan pasar guna menjamin keberlanjutan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dispangtan dalam penyediaan pasar pada Program *Buruan SAE* dengan studi kasus Kelompok Motekar di Kelurahan Isola. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispangtan berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara Kelompok Motekar dengan berbagai saluran pemasaran, seperti pasar lokal, kegiatan bazar, serta jejaring penjualan berbasis komunitas. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan pendampingan, belum rutinnnya kegiatan sosialisasi pemasaran, serta belum terbangunnya sistem pemasaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dispangtan melalui peningkatan intensitas pendampingan dan pengembangan strategi pemasaran agar Program *Buruan SAE* dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi Kelompok Motekar di Kelurahan Isola.

Kata Kunci: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, *Buruan SAÈ*, Peran, Penyediaan Pasar.

Abstract

*The *Buruan SAÈ* Program is an initiative of the Bandung City Government aimed at strengthening community-based food security. The success of this program depends not only on agricultural production but also on the availability of market access for agricultural products. The Food and Agriculture Office (Dispangtan) of Bandung City*

plays an important role in facilitating market provision to support the sustainability of the Buruan SAE Program. This study aims to analyze the role of Dispangtan in market provision within the Buruan SAE Program, using the Motekar Group in Isola Subdistrict as a case study. This research employed a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that Dispangtan acts as a facilitator and companion in linking the Motekar Group with marketing channels, such as local markets and bazaar activities. However, this role has not been implemented optimally due to limited mentoring time and irregular marketing socialization activities. These constraints have affected the Motekar Group's ability to fully utilize available market opportunities. Therefore, strengthening Dispangtan's role through increased mentoring and the development of sustainable marketing strategies is necessary.

Keywords: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Buruan SAE, market provision.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu nasional yang senantiasa menjadi prioritas pembangunan Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim global, persoalan pangan semakin kompleks dan menuntut adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi (Chaireni, 2020).

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, penggunaan lahan di Kota Bandung menunjukkan adanya dominasi oleh bangunan pemukiman yang mencapai 45,69% dari total luas wilayah Kota Bandung. Sementara itu, kawasan industri menempati 6,42% dan kawasan lahan hijau yang hanya mencapai 6,39%. Dengan persentase tersebut, Kota Bandung masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan minimal 30% dari total luas wilayah kota dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kapasitas daerah dalam menjaga fungsi ekologis, termasuk ketersediaan ruang untuk produksi pangan lokal. Kondisi tersebut pada akhirnya

cenderung meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah luar Kota Bandung, yang berimplikasi pada menurunnya kemandirian pangan daerah serta meningkatnya risiko kerentanan apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga komoditas (Dunn, 2019).

Pemerintah Kota Bandung menanggapi tantangan tersebut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meluncurkan inovatif yang dikenal dengan nama *Buruan SAÉ* (Sehat, Alami, dan Ekonomis). Program *Buruan SAÉ* merupakan *Buruan SAÉ* adalah sebuah program urban farming terintegrasi yang di galakkan oleh dinas pangan dan pertanian kota Bandung, yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di kota Bandung. melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Program ini muncul sebagai inovasi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pemanfaatan lahan pekarangan, atap, hingga ruang terbuka terbatas di Kawasan perkotaan untuk kegiatan pertanian, baik berupa budidaya sayuran, buah, tanaman obat, maupun ternak kecil. Tujuan utama program *Buruan SAÉ* adalah meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan membuka peluang ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian perkotaan. Program ini mendapat sambutan positif karena sesuai dengan tantangan urbanisasi di Bandung yang ditandai oleh minimnya lahan produktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan tahapan strategis atau *milestone* pelaksanaan Program *Buruan SAÉ*, sebagai bentuk solusi atas keterbatasan lahan dan rendahnya pemanfaatan pekarangan di lingkungan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tiga (3) tahapan dalam mendukung Program *Buruan SAE*, yaitu untuk Pada tahap jangka pendek, fokus utama diarahkan pada penguatan dasar pelaksanaan program. Kegiatan diawali dengan koordinasi lintas perangkat daerah melalui pembentukan tim efektif sebagai penggerak utama program. Selanjutnya, diterbitkan Surat Edaran Wali Kota yang mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai *Buruan SAE*. Pada tahap ini juga dilakukan pendataan dan penentuan lokasi percontohan, disertai penyiapan bahan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Memasuki tahap jangka menengah, Program *Buruan SAE* diarahkan pada penguatan sistem dan pengembangan yang lebih terintegrasi. Menurut Menurut Wijaya (2020) Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan satu kawasan percontohan *integrated urban farming* berbasis sawah, penyusunan perencanaan anggaran untuk pendampingan dan pengembangan kawasan, serta pengembangan aplikasi sebagai sarana pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, dibentuk forum *Buruan SAE* sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi, serta disusun modul pengajaran *Buruan SAE* sebagai pedoman pelaksanaan dan pembelajaran bagi masyarakat.

Melalui penyusunan tahapan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menjadikan Program *Buruan SAE* sebagai peta jalan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan. Pelaksanaannya mencakup pembentukan dan pembinaan kelompok *Buruan SAE* di setiap kecamatan, pelatihan teknis budidaya dan pengelolaan kelompok, penyediaan sarana produksi seperti

bibit, pupuk, dan peralatan pertanian, serta pendampingan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil panen. Dengan pendekatan ini, *Buruan SAE* diharapkan tidak hanya menjadi program kegiatan semata, tetapi tumbuh sebagai gerakan berkelanjutan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Kota Bandung.

Buruan SAE pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2020, program *Buruan SAE* mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Bandung. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 150 kelompok masyarakat secara resmi yang tergabung dalam program ini. Angka ini terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan. Pada tahun 2022 kelompok *Buruan SAE* bertambah menjadi 250 kelompok. Lalu pada tahun 2023 bertambah menjadi 375 kelompok. Hingga tahun 2024, tercatat ada sebanyak 471 kelompok *Buruan SAE* yang tersebar di 151 kelurahan di Kota Bandung. Semakin bertambahnya jumlah kelompok *Buruan SAE* juga mengalami diversifikasi kegiatan.

Dari 471 kelompok sebanyak 30 kelompok *Buruan SAE* berhasil dalam memasarkan hasil program *Buruan SAE*. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar kelompok *Buruan SAE* di beberapa kelurahan Kota Bandung masih belum bisa memasarkan hasil program ini. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai perangkat daerah memiliki legitimasi kuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan dari Wali Kota. Hal ini menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara formal memiliki kewenangan penuh untuk merancang, mengimplementasikan, sekaligus mengevaluasi berbagai program ketahanan pangan masyarakat.

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diwujudkan melalui program *Buruan SAE* yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Dokumen perencanaan ini memuat tiga (3) tahap utama, yaitu: pembentukan Tim Efektif yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang *integrated*, menetapkan surat edaran Walikota Bandung tentang pemanfaatan pekarangan sebagai *Buruan SAE*, dan penyediaan pasar hasil program *Buruan SAE*. Dua tahap awal relatif telah menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya jumlah kelompok *Buruan SAE* yang mampu memproduksi pangan rumah tangga dan mengolahnya menjadi produk olahan sederhana. Akan tetapi, tahap ketiga yakni penyediaan pasar masih menghadapi kendala. Sejauh ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dinilai belum optimal dalam merancang skema distribusi atau penyaluran pemasaran yang berkelanjutan.

Kondisi ini dapat dilihat secara langsung pada Kelompok *Buruan SAE* Motekar di Kelurahan Isola. Kelompok *Buruan SAE* Kelurahan Isola berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar demi menjual hasil dari program *Buruan SAE*. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memfasilitasi kelompok *Buruan SAE* Motekar dengan Hotel *Mercure*

Kota Bandung, yang secara teratur membeli hasil panen *Buruan SAE* Motekar seperti sayuran segar untuk kebutuhan dapur. Bentuk kerja sama ini bukan hanya membantu masyarakat untuk menyerap hasil pertanian, melainkan juga memperkenalkan praktik pertanian perkotaan sebagai salah satu bagian dari rantai makanan yang berkelanjutan di wilayah urban.

Kelompok *Buruan SAE* Motekar juga membuka jalur distribusi ke Pasar swasta di Kota Bandung, yaitu Pasar Caringin. Kelompok *Buruan SAE* Motekar menjual hasil program *Buruan SAE* ke Pasar Caringin sebanyak 2 kali dalam seminggu karena adanya keterbatasan hasil panen kelompok *Buruan SAE* Motekar. Kerja sama ini menjadi langkah awal yang untuk menjalin hubungan antara petani urban dengan pasar tradisional.

Keterbatasan langkah dinas dalam membuka jalur distribusi yang lebih jelas, minimnya pendampingan kelembagaan, serta lemahnya fasilitasi pemasaran menyebabkan hasil panen kelompok belum memiliki nilai tambah secara ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat kelompok dalam meningkatkan produksi dengan keterlibatan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan, memberikan dukungan teknis, dan memfasilitasi pemasaran. Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak lebih efektif dalam mempertegas perannya, baik melalui pemberian arahan kebijakan yang tepat maupun dukungan praktis yang nyata dalam menjamin keberlanjutan serta efektivitas program. Menurut Menurut Ryaas Rasyid (2002) peran merupakan Peran adalah seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan peran. Peran adalah seorang manusia yang di mana memiliki beberapa peran sekaligus (Putri, Rahman, & Alqarni, 2023). Peran Pemerintah bisa berjalan jika suatu

pemerintah mempunyai beberapa peran, yaitu Peran sebagai Regulator, Peran sebagai Dinamisator, dan Peran sebagai Fasilitator. Dengan demikian, teori peran menurut Ryaas Rasyid menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam pembangunan suatu daerah tergantung pada keterlibatan Pemerintah dengan masyarakat sebagai subjek perubahan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran dinas ketahanan pangan dan pertanian kota bandung dalam menyediakan pasar hasil program buruan sae (Zubair, 2023). Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi enam (6) informan utama yakni Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Ketua Tim Pengembangan Pangan Lokal Bidang Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Isola, Sekretaris Kelompok Buruan SAE, dan Unsur Kelompok Motekar (Anggota Kelompok Motekar Isola).

Instrument utama penelitian Adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan pengumpulan dokumen resmi dari instansi terkait Wijaya (2020)). Data primer berasal dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Peraturan Daerah, dan publikasi media Kota Bandung terkait Program *Buruan SAE*. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Validitas Data diperkuat dengan triangulasi sumber sebagaimana disarankan dalam penelitian kualitatif (sumber).

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori peran dari Ryaas Rasyid (sumber) yang mencakup tiga (3) tahapan, yakni Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Model statistik tidak digunakan karena penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif bersifat relevan, valid, dan sesuai dengan fokus penelitian (Hafni & Sahir, 2021).

PEMBAHASAN

Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyediaan akses pasar bagi hasil program *Buruan SAE* bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan program *Buruan SAE*. Hal ini terlihat dari adanya upaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam memastikan hasil produksi kelompok dapat terserap pasar secara berkelanjutan. Ditinjau dari aspek regulasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung diharapkan berfungsi sebagai regulator yang dapat mendorong kebijakan dan standar yang jelas, sebagai dinamisator dalam mendorong penguatan kelembagaan serta inovasi usaha kelompok, dan sebagai fasilitator yang membuka akses serta jaringan pemasaran bagi pelaku *Buruan SAE* Achiruddin (2014).

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan oleh peneliti bahwa terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan penyediaan pasar hasil program *Buruan SAE*. Adapun dimensi yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Penyediaan Pasar Hasil Program *Buruan SAE* Kota Bandung (Studi kasus Kelompok Motekar Kelurahan Isola dengan menggunakan dimensi Peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yang di mana terdiri dari tiga (3) dimensi, antara lain:

1) Dimensi Regulator

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan yang menjadi acuan bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertanian perkotaan. Melalui kebijakan ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung berupaya untuk mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit menjadi sumber pangan produktif. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota

Bandung berfungsi sebagai pengatur yang memastikan bahwa kegiatan di lapangan, termasuk yang dilakukan oleh Kelompok Motekar di Kelurahan Isola, berjalan sesuai dengan tujuan program dan ketentuan yang berlaku.

a) Kebijakan

Pada tahapan penyediaan pasar hasil, pelaksanaannya masih belum optimal. Kondisi di lapangan, khususnya di Kelurahan Isola, menunjukkan bahwa hasil panen kelompok *Buruan SAÈ* belum memiliki jalur pemasaran yang pasti. Sebagian hasil produksi masih dimanfaatkan secara internal oleh anggota kelompok atau dipasarkan dalam skala terbatas di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan belum berfungsinya peran pemerintah secara maksimal sebagai fasilitator pasar. keberhasilan penerapan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung, termasuk akses terhadap jaringan distribusi dan pasar. Sejalan dengan pendapat (Dunn, 2019) yang menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan dampak nyata sesuai dengan tujuann yang telag ditetapkan.

b) Pengawasan

Pengawasan dalam penyediaan pasar hasil Program *Buruan SAÈ* menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat lapangan. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung bersama pihak kelurahan melalui pemantauan aktivitas kelompok, pengecekan proses distribusi hasil panen, serta penilaian terhadap pemanfaatan pasar yang telah difasilitasi. Melalui mekanisme ini, dinas dapat memantau aktivitas kelompok *Buruan SAÈ*, termasuk bagaimana hasil panen disalurkan dan sejauh mana akses pasar yang tersedia dimanfaatkan oleh kelompok

2) Dimensi Dinamisator

Menurut (Chaireni, 2020) Dinamisator berperan untuk menggerakkan kelompok agar mampu berkembang, tidak hanya dalam hal produksi tetapi juga pengelolaan dan pemasaran hasil panen. Hal ini sejalan dengan tujuan Program *Buruan SAÈ* yang menekankan kemandirian kelompok melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan rutin. Pada praktiknya, pembinaan diberikan secara berjenjang mulai dari dinas hingga pendamping lapangan, di mana setiap kecamatan difasilitasi sekitar lima belas orang pendamping. Namun, intensitas pendampingan sering kali berbeda di tiap kelompok.

a) Pembinaan dan Pendampingan

Di Kelompok Motekar Kelurahan Isola, pembinaan dan pendampingan dirasakan bermanfaat terutama ketika pendamping hadir langsung memberikan arahan teknis maupun strategi pemasaran. Meski begitu, ada kalanya pendamping tidak selalu hadir sehingga kelompok harus mandiri mencari solusi, misalnya dalam mengatur harga atau menyalurkan hasil panen. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi dinamisator telah berjalan, tetapi masih perlu penguatan agar kelompok benar-benar merasakan kontinuitas pendampingan dan tidak kesulitan ketika menghadapi kendala.

b) Sosialisasi

kegiatan sosialisasi pada Kelompok Motekar Kelurahan Isola belum berjalan secara optimal. Sosialisasi yang berfungsi sebagai sarana penggerakan, pengarahan, dan pembinaan kelompok masih menghadapi kendala keterbatasan waktu serta jumlah pendamping di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi belum dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga pemahaman anggota Kelompok Motekar terhadap tujuan dan mekanisme kegiatan kelompok belum sepenuhnya merata. Sosialisasi merupakan instrumen penting untuk membangun pemahaman bersama serta mendorong partisipasi aktif kelompok. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara berkesinambungan, proses pengarahan dan pembinaan menjadi kurang efektif. Hal ini terlihat pada Kelompok Motekar, di mana sosialisasi lebih sering dilakukan bersamaan dengan

kegiatan tertentu, seperti pelatihan atau pertemuan kelompok. Di luar kegiatan tersebut, penyampaian informasi kepada anggota Kelompok Motekar masih bergantung pada komunikasi informal antaranggota, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan kelompok.

c) Peningkatan Kapasitas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung terhadap Kelompok Motekar di Kelurahan Isola telah memberikan dampak positif. Kegiatan-kegiatan seperti memberikan pembinaan kepada anggota Kelompok Motekar, sosialisasi, dan juga peningkatan kapasitas membantu dalam meningkatkan kemampuan teknis budidaya, memperkuat motivasi, dan memfasilitasi pembelajaran manajemen kelompok serta strategi pemasaran. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah pendamping, waktu yang tidak konsisten, serta hambatan teknis seperti sarana dan lahan. Akibatnya, penyampaian informasi, penguasaan materi, dan pemerataan kapasitas anggota masih belum merata, sehingga sebagian anggota harus lebih mandiri dalam menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan seperti informasi mengenai jadwal ataupun ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Dinamisator menurut Ryass Rasyid menuntut pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui bimbingan, pelatihan, serta pemberdayaan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menjalankan peran dinamisator di Kelompok Motekar melalui pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas anggota, meskipun perlu penguatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, pemerataan informasi, dan intensitas pendampingan agar seluruh anggota kelompok dapat lebih mandiri, produktif, dan mampu mengelola hasil panen secara berkelanjutan.

3) Dimensi Fasilitator

Fasilitator merupakan dimensi yang berfokus pada peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program *Buruan SAE*, khususnya pada aspek penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelompok dalam memasarkan hasil program. Dukungan ini mencakup penyediaan alat pertanian, rumah bibit, media promosi, serta fasilitas pendukung lainnya yang membantu kelompok dalam mengelola hasil panen agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Dalam konteks ini, peran fasilitator yang dijalankan oleh dinas memberikan manfaat bagi kelompok Motekar sebagai penerima bantuan, karena melalui dukungan tersebut kelompok dapat menjalankan kegiatan secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar hasil panen.

a) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan dalam Program *Buruan SAE* sudah cukup mendukung kegiatan kelompok dalam mengelola hasil pertanian. Kelompok telah mendapatkan fasilitas seperti rumah bibit, alat pertanian, pupuk, dan *polybag* yang membantu memperlancar proses budidaya hingga panen. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan tempat penyimpanan hasil panen serta beberapa alat yang kurang sesuai dengan kondisi lahan di kelompok Motekar. Akibatnya, sebagian hasil panen yang tidak tertampung terkadang dibagikan kepada warga sekitar agar tidak terbuang. Dengan demikian, meskipun sarana dan prasarana yang ada sudah memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kelompok, diperlukan peningkatan dan penyesuaian fasilitas agar pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dapat berjalan lebih optimal.

b) Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi mencakup beberapa aspek, mulai dari data produksi, hasil panen, jadwal kegiatan kelompok, hingga peluang kerja sama dengan pihak lain. Dinas berupaya menyalurkan informasi melalui media sosial, pameran, dan kegiatan seperti Gerakan Mudah

Pangan, serta berkoordinasi dengan pendamping dan kelurahan agar informasi dapat menjangkau seluruh kelompok. Pendamping berperan sebagai penghubung utama antara dinas dan kelompok dengan menyampaikan setiap informasi baru dan membantu publikasi kegiatan kelompok. Sementara itu, kelompok seperti Motekar merasa terbantu karena informasi tersebut mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dan memanfaatkan peluang pemasaran. Namun, sebagian masyarakat masih harus mencari informasi sendiri karena penyebarannya belum merata dan banyak yang masih mengandalkan komunikasi antar warga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyediaan informasi sudah berjalan, masih perlu peningkatan dalam pemerataan akses dan pemanfaatan media agar seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan menyeluruh.

c) Penyediaan Anggaran

Penyediaan anggaran sebesar 25 juta rupiah per kecamatan hanya disampaikan oleh pihak dinas, sedangkan menurut ketua pendamping dan ketua kelompok, dana tersebut tidak pernah mereka terima secara langsung atau tidak sampai ke tangan kelompok. Bantuan yang mereka rasakan sejauh ini lebih bersifat non uang, seperti pemberian bibit, polybag, alat tanam, serta dukungan untuk mengikuti kegiatan bazar, pelatihan, dan pameran hasil pertanian. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pemahaman antara pihak dinas dan pelaksana program di tingkat lapangan mengenai bentuk dan mekanisme penyaluran anggaran. Meskipun kegiatan *Buruan SAÈ* tetap berjalan melalui dukungan fasilitas dan pendampingan, ketidakjelasan mengenai realisasi dana tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan kelompok terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung keberlanjutan penyediaan pasar hasil program.

4) Kerja sama

Kelompok Motekar pernah menjalin kerja sama dengan Hotel *Mercure* dan Pasar Caringin untuk menjual hasil panen seperti sayuran dan

tanaman pangan. Namun, kerja sama tersebut tidak berlanjut setelah kegiatan awal berakhir karena tidak adanya tindak lanjut dan perjanjian yang mengikat antar pihak. Saat ini, kelompok juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), tetapi prosesnya masih dalam tahap komunikasi awal. Kelompok berharap kerja sama seperti ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu mereka dalam memasarkan hasil panen. Meskipun begitu, mereka merasa masih memerlukan pendampingan lebih lanjut dari dinas agar hubungan dengan mitra dapat terjaga dan tidak berhenti di tengah jalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam Penyediaan Pasar Hasil Program Buruan SAÈ (Studi Kasus Kelompok Motekar Kelurahan Isola), dengan menggunakan tiga (3) dimensi peran dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peran dinas telah berjalan pada masing-masing dimensi tersebut meskipun, dengan tingkat capaian berbeda. Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Regulator

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah menjalankan perannya dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Motekar, khususnya dalam pengelolaan hasil pertanian. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang secara khusus mengatur mekanisme pemasaran hasil Program *Buruan SAÈ* secara jelas dan terstruktur. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan Kelompok Motekar masih sangat bergantung pada arahan sementara dari dinas, sehingga pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian belum sepenuhnya berjalan secara mandiri.

2) Dinamisator

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam menggerakkan dan memotivasi kelompok Motekar agar lebih aktif melalui pendampingan secara teknis, pelatihan, dan kegiatan promosi

hasil panen. Kelompok Motekar termasuk salah satu kelompok yang cukup aktif karena memiliki kepemimpinan internal yang solid dan inisiatif tinggi dalam mengembangkan hasil produksinya.

3) Fasilitator

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung telah membantu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan kelompok Motekar serta peluang untuk mengikuti acara seperti pameran. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas penunjang seperti kendaraan operasional menjadi kendala dalam proses distribusi hasil panen kelompok ke lokasi pemasaran. Hal ini juga diperparah dengan kerja sama yang masih belum berkelanjutan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan berbagai mitra seperti Hotel Mercure, Pasar Caringin, maupun SPPG dalam mendukung MBG (Makan Bergizi Gratis).

DAFTAR PUSTAKA

- Achiruddin, A., & Saleh. (2014). *Psikologi Sosial*. IAIN Parepare Nusantara Press
- Cohen, B. J. (2008). Theory and Problem of Introduction to Sociology. In B. J. Cohen. McGraw-Hil.
- Chaireni, R. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 02*.
- Dunn. (2019). Factors for the Successful Implementation of Policies. *Journal of Education and Review, Vol. 7(8)*.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 03(No. 01)*.
- Hafni, S., & Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Rasyid, M. R. (2002). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dan Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Abdi Tandur.

- Partini, & Sari, I. (2022). Kebijakan Pengembangan Ketahanan Pangan Lokal. *Jurnal Agribisnis Unis, Vol. 11*(No. 1).
- Putri, D. S., Yuningsih, Y. N., & Darmawan, I. (2023). Implementasi Program *Buruan Sae* (Sehat, Alami, Ekonomis) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021 (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Bandung). *Jurnal Administrasi Pemerintahan,, Vol. 3*(No. 1.).
- Sitawati, Nurlaelih, E. E., & Damaiyanti, D. R. (2019). *Urban Farming untuk Ketahanan Pangan*. UB Press.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. In S. Soekanto. Rajawali Press: Rajawali Press.
- Nurrachman, A. (2020). Peran Pemerintah Untuk Mencapai Tujuan Bangsa Dengan Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol. 02*(No. 02)
- Wijaya, K. (2020). Pemanfaatan *Urban Farming* Melalui Konsep Eco-Village Di Kampung Paralon Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal Arsitektur, Vol. 04*(No. 01).
- Sitawati, Nurlaelih, E. E., & Damaiyanti, D. R. (2019). *Urban Farming untuk Ketahanan Pangan*. UB Press.
- Zubair, F. (2023). Pelatihan Media Literasi Digital Bagi Pengelola "Buruan SAÈ" di Kelurahan Palasari Bandung. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora, Vol. 05*(No. 01), 25-32.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah